

**Pandangan Akademik
RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan
Swedia Tentang Kerjasama dalam Bidang
Pertahanan**

Jakarta, Gedung DPR-RI, 8 September 2020

Prof. Dr. Huala Adolf SH LLM.
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

Arti Penting Persetujuan

1. Tindakan berdaulat (*Sovereign act*) Negara RI.
2. Sektor Pertahanan berpengaruh langsung terhadap kedaulatan dan HANKAM.
-> Harus dalam bentuk UU (***Pengesahan DPR***)
3. Persetujuan pertahanan terkait aspek hukum terutama hukum nasional dan hukum internasional.
-> Implikasi hukum.

Identifikasi Permasalahan

- 1) Implikasi Persetujuan.**
- 2). Urgensi Persetujuan bagi kepentingan pertahanan keamanan RI.**

PEMAPARAN

- I. Relevansi Swedia dan Kerja Sama
Pertahanan RI - Swedia**

- II. Muatan Persetujuan**
Implikasi juridis dari Persetujuan.

- III. Analisis atas Identifikasi Permasalahan**

I. Relevansi Swedia

1. Negara Netral (PD I dan PD II)
2. Memiliki kekuatan militer kuat di dunia
 - i. Pengekspor alutsista terbesar ke-4 dunia
 - ii. Sejak 1980 peralatan militer Swedia di RI
3. Negara pantai (dengan struktur geografis khas)
4. Hubungan baik dan kerja sama Swedia – RI yang cukup harmonis di berbagai bidang.

I. Relevansi Kerja sama Pertahanan Dengan Swedia

1. Pengakuan Swedia terhadap Pertahanan RI.
2. Meningkatkan kerja sama pertahanan lebih erat kedua negara
3. Membuka lebih lanjut hubungan baik di bidang alih teknologi, *maritim*, dll
4. Situasi Kondisi Keamanan di Asia Tenggara (Ketegangan AS – China)
5. Posisi RI di Asia Tenggara

I. Relevansi Swedia Persetujuan Sebelumnya

- 1. Protocol Amending to the Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Kingdom of Sweden, signed in Jakarta on 29 July 1954**
- 2. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Sweden for Air Services between their respective Territories (1971)**
- 3. Convention between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income (1989)**
- 4. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden on the Promotion and Protection of Investments and Protocol (1992)**

....

I. Relevansi Swedia Persetujuan Sebelumnya

- 5. Letter of Intent regarding Science, Technology and Innovation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden (2013)**
- 6. Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Health Cooperation (2013)**
- 7. Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden on Environmental Cooperation (2013)**
- 8. Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of the Environment and Energy of the Kingdom of Sweden on Cooperation in the Field of Energy Development (2017)**

....

I. Relevansi Swedia Persetujuan Sebelumnya

- 9. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Transport Sector (2017)**
 - 10. Memorandum of Understanding between the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education and Research of the Kingdom of Sweden on Research, Technology and Higher Education Cooperation (2017).**
- > Kerjasama selama ini dalam berbagai bidang – selain pertahanan - sudah cukup baik**

II. Muatan Persetujuan Preambul/Mukadimah dan 9 Pasal.

A. Mukadimah:

- 1). Meningkatkan dan memperkuat hubungan pertahanan didasarkan prinsip kesetaraan, saling percaya dan pengertian.
- 2). Memperkuat hubungan TNI dan AB Swedia
- 3). Menghormati kedaulatan dan integritas wilayah kedua pihak
- 4). *Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara.*

II. Muatan Persetujuan Preambul/Mukadimah dan SUBSTANSI (9 Pasal)

B. SUBSTANSI: 1. Ruang Lingkup Kerja Sama

- (i) Pertukaran informasi, pengalaman, praktik terbaik tentang politik militer dan isu *keamanan maritim internasional*.
- (ii) Penelitian dan Pengembangan, *IPTEK*
- (iii) Kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang *dukungan logistik dan pemeliharaan*
- (iv) *Transfer teknologi*, penelitian bersama, produksi dan pemasaran bersama, dan jaminan kualitas
- (v) *Pelatihan dan pendidikan* termasuk personel sipil pada Kemhan
- (vi) Kerjasama dalam kedokteran militer dan pelayanan *kesehatan militer (Pasal 2)*

II. Muatan Persetujuan Preambul/Mukadimah dan SUBSTANSI (9 Pasal)

B. SUBSTANSI:

- 2. Kerahasiaan (Pasal 4)**
- 3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 5)**
- 4. Kemungkinan amandemen terhadap Persetujuan (Pasal 7)**
- 5. Biaya masing-masing pihak (Pasal 8)**
- 6. Pengakhiran Persetujuan (Pasal 9)**

III. Analisis atas Identifikasi Permasalahan

1) Implikasi Persetujuan

1. Hukum

-> Komitmen tidak melanggar hukum nasional (Mukadimah)

2. Substansi

Pengembangan kerja sama bilateral di bidang pertahanan, pertukaran informasi, penelitian dan pendidikan, kesehatan, IPTEK, keamanan maritim -> *Kepentingan RI*

III. Analisis atas Identifikasi Permasalahan

1) Implikasi Persetujuan

3. Biaya

Ditanggung masing-masing (Pasal 8)

4. Klausul Pengaman

a. Amandemen Persetujuan (Pasal 7)

b. Pengakhiran Persetujuan (Pasal 9)

III. Analisis atas Identifikasi Permasalahan

2). Urgensi Persetujuan

- 1. Kesempatan Kerja Sama**
- 2. Kebutuhan Alutsista**
- 3. Pengembangan SDM**
- 4. Pengembangan IPTEK**
- 5. Aspek Kesehatan Hankam**
- 6. Situasi dan kondisi Keamanan Maritim**
- 7. Situasi Laut China Selatan**

China Respons Keras AS, Bukan ke ASEAN

BEIJING, JUMAT — Amerika Serikat dan China saling tuding sebagai pemicu ketegangan di kawasan Laut China Selatan menyusul latihan perang militer China di perairan sengketa dekat Kepulauan Paracel, Laut China Selatan, mulai Rabu lalu hingga Minggu (5/7/2020). Dua negara ASEAN, Vietnam dan Filipina, juga melontarkan kritik keras dan protes ke Beijing.

Namun, hingga Jumat, China tak membalas kritik kedua negara tersebut. Beijing mengerahkan militernya latihan perang lima hari di dekat Kepulauan Paracel, yang juga diklaim Vietnam. Sejak Rabu, kapal perang dan pesawatintai militer China terlihat di pulau-pulau reklamasi China di Laut China Selatan,

Latihan itu diumumkan, Minggu (28/6), oleh Badan Keselamatan Maritim (MSA) Hainan, provinsi yang membawahkan pulau-pulau yang diklaim China di Laut China Selatan. Selama latihan, MSA Hainan melarang kapal-kapal mendekati perairan lokasi operasi.

Washington lewat Departemen Pertahanan menuduh China melakukan militerisasi Laut China Selatan. China juga dituding berusaha mengintimidasi negara-negara tetangga di Asia

Tenggara. Pentagon mengatakan, Kamis (2/7), latihan militer di perairan sengketa Laut China Selatan "kontraproduktif terhadap upaya meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas".

"Latihan militer itu bagian dari rentetan panjang langkah RRC memaksakan klaim tak berdasarkan aturan dan merugikan tetangga-tetangganya di Asia Tenggara di Laut China Selatan," kata Pentagon.

Vietnam dan Filipina juga melontarkan protes pada China. Jubir Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang, Kamis, mengatakan, Hanoi telah mengirim nota protes kepada Beijing karena latihan militer China itu ilegal.

"Latihan militer ilegal China di Kepulauan Paracel melanggar kedaulatan Vietnam, menyulitkan perundingan China-ASEAN (tentang) panduan perilaku para pihak (CoC) di Laut China Selatan, serta berdampak pada perdamaian," ujarnya.

Protes Filipina tak kalah kerasnya. Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan, latihan militer China "sangat provokatif". Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr mengakui, latihan itu di luar teritorial negaranya. "Jika la-

ihan itu melebar ke teritorial Filipina, China akan diperingatkan bahwa tindakannya akan dibalas dengan respons paling keras secara diplomatik dan cara lain yang tepat," katanya.

Dalam jumpa pers di Beijing, Jumat, jubir Kemlu China Zhao Lijian menegaskan, latihan militer itu berada di dalam kedaulatan teritorial China. "Beberapa negara dari luar kawasan ini rutin bepergian ke sana-kemari di Laut China Selatan untuk latihan militer skala besar, unjuk kekuatan," katanya.

Latihan militer China di Laut China Selatan, pekan ini, digelar setelah AS dan sekutunya menggelar sedikitnya tiga latihan perang di kawasan itu selama Juni 2020.

Pakar geopolitik di University of New South Wales, Carl Thayer, menyebut China diuntungkan dengan penundaan perundingan CoC dengan ASEAN akibat pandemi. Sebab, Beijing bisa terus memaksakan kedaulatan di Laut China Selatan selama pandemi dan menciptakan penguat klaim, seperti pembuatan dua pemerintah daerah untuk pulau-pulau bucatannya di Laut China Selatan.

(AFP/REUTERS/
AP/RAZ/CAL/SAM)

Australia Tolak Klaim China

SYDNEY, SABTU — Pemerintah Australia dalam deklarasi resminya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak klaim teritorial dan maritim China di perairan Laut China Selatan. Sikap Australia ini segaris dengan sikap Pemerintah Amerika Serikat dan semakin memanasakan hubungan Washington-Beijing.

Pernyataan Australia itu disampaikan kepada PBB, Kamis (23/7/2020). Canberra menyatakan, Beijing tak memiliki dasar hukum dalam klaimnya atas Laut China Selatan (LCS). "Australia menolak klaim China atas 'hak sejarah' atau 'hak dan kepentingan maritim', sebagaimana ditetapkan dalam perjalanan panjang praktik kesejarahan di LCS," demikian pernyataan Australia.

"Tidak ada dasar hukum bagi China untuk menggambar garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar fitur kelautan atau kelompok pulau di LCS, termasuk di sekitar kepulauan Four Sha atau kontinental atau bentang kepulauan."

Seperti dilaporkan *The Telegraph*, deklarasi itu mengatakan, Australia tidak menerima klaim kedaulatan China atas Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly di LCS. Awal bulan ini, kapal perang

Australia berpapasan dengan angkatan laut China di dekat Kepulauan Spratly. Kala itu, militer angkatan laut Australia mengikuti latihan perang bersama militer Jepang, AS, dan Filipina.

"Keputusan pengadilan arbitrase tentang Laut China Selatan tahun 2016 menunjukkan klaim-klaim ini tidak konsisten dengan UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) dan karena ketidakakuratan itu, (klaim China) tidak valid," demikian lanjutan deklarasi Australia.

Deklarasi Canberra itu keluar setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan klaim Beijing atas wilayah dan sumber daya di LCS sebagai hal ilegal. Pompeo secara eksplisit juga menyatakan dukungannya atas klaim teritorial negara-negara Asia Tenggara di LCS.

Beijing mengklaim hampir seluruh LCS berdasarkan sembilan garis putus-putus, suatu garis batas samar-samar yang berasal dari peta tahun 1940-an. Bersama Taiwan, ada empat negara di Asia Tenggara yang juga mengklaim LCS, yakni Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

Pernyataan terbaru Australia itu dikeluarkan menjelang pembicaraan tahunan antara Australia dan AS. Sejumlah

menteri Australia dijadwalkan berkunjung ke Washington untuk pertama kalinya sejak perbatasan Australia ditutup karena pandemi Covid-19 pada awal tahun ini.

Menlu Australia Marise Payne dan Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds dalam pernyataannya di Canberra, Sabtu (25/7), menyatakan, pertemuan Australia dan AS akan terfokus pada upaya bersama mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, tangguh, terbuka, aman, dan makmur, khususnya dalam konteks menghadapi dampak Covid-19.

Ketegangan Australia-China meningkat awal tahun ini ketika Canberra ikut mendorong untuk penyelidikan penanganan Beijing terhadap wabah Covid-19. Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham mengeluh bahwa menteri perdagangan China tidak menjawab panggilan teleponnya pada Mei lalu. Sejak itu, China mengeluarkan peringatan kepada warga negaranya agar tidak melakukan perjalanan ke Australia karena kekhawatiran dan tudingan soal rasisme.

Pada Juni, Jubir Kemlu China Zhao Lijian menuduh Australia melakukan aksi spionase massal dan "memicu konfrontasi". (AFP/BEN)

KESIMPULAN

- 1) Persetujuan memberi implikasi positif bagi bidang pertahanan RI
- 2) Persetujuan Kerja Sama RI - Swedia di Bidang Pertahanan mendesak disahkan

“Peran Yth DPR sangat menentukan dalam memberikan pengesahan”

TERIMA KASIH

CATATAN

1. Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ...

Halaman 2 tertulis:

“ ... Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2016 di Jakarta, Indonesia”

Halaman 2 seharusnya:

“ ... Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia”